

**PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA
(STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh :

Frislidia
2320112013

DOSEN PEMBIMBING

PROF. DR. ZAINUL DAULAY, SH., MH
DR. DELFIYANTI, SH., MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

**GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA:
STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA**
(Frislidia, NIM 2320112013, 108 Halaman, Program Studi Magister
Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2026)

ABSTRAK

Pengaturan GATS, atau Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa, diatur dalam Annex 1B dari Perjanjian WTO, yang menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam perdagangan jasa komunikasi. Perum LKBN Antara yang ditugaskan Negara, berdasarkan pasal 1 ayat 3 GATS, maka layanan yang diberikan Antara masuk dalam ruang lingkup pengecualian jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah yakni jasa yang tidak disuplai secara komersial atau kompetisi. Praktik bisnis Antara juga tunduk pada liberalisasi bertahap seperti diatur dalam Pasal IV dan XIX GATS yakni layanan jasa komunikasi disesuaikan dengan tujuan kebijakan nasional. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip dalam GATS pada sektor jasa komunikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip GATS di Indonesia khusus pada sektor jasa komunikasi dalam kaitannya dengan Perum LKBN Antara dalam menghadapi liberalisasi sektor jasa komunikasi. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka GATS pada sektor komunikasi serta mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara kepada pejabat Perum LKBN Antara, dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum dan literatur terkait. Praktik Perum LKBN Antara serta mengatur hak dan kewajibannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal XVI dan Pasal XVII GATS mengatur sektor jasa serta Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Kata Kunci: *Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi, GATS, Praktik dan Perum LKBN Antara.*

**REGULATION OF COMMUNICATION SERVICES TRADE WITHIN THE FRAMEWORK OF
THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) IN INDONESIA:
A STUDY OF THE PRACTICES OF PERUM LKBN ANTARA**
(Frislidia, Student ID 2320112013, 108 Pages, Master of Law Program, Andalas University, 2026)

ABSTRACT

The GATS, or General Agreement on Trade in Services, is regulated in Annex 1B of the WTO Agreement, which establishes the rules and principles that member countries must follow in trade in communications services. Based on Article 1, paragraph 3 of the GATS, Antara's services fall within the scope of the exception to services provided in the exercise of government authority, namely services that are not supplied commercially or competitively. Antara's business practices are also subject to gradual liberalization as regulated in Articles IV and XIX of GATS, namely communication services are adjusted to national policy objectives. The formulation of the problem in this thesis is how the principles of GATS are applied to the communication services sector in Indonesian legislation, how the implementation of GATS principles in Indonesia specifically in the communication services sector in relation to Perum LKBN Antara in facing the liberalization of the communication services sector. The purpose of this research is to review and analyze the regulation of trade in services within the GATS framework in the communication sector and to review and analyze the practice of trade in communication services in Indonesia through Perum LKBN Antara. This research uses an empirical juridical approach with primary data through interviews with Perum LKBN. The practices of Antara News Agency and its rights and obligations are regulated by Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and Articles XVI and XVII of the GATS, which regulate the services sector. These include Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, and Government Regulation Number 40 of 2007 concerning the Public Company (Perum) Antara National News Agency.

Keywords: *Regulation of Trade in Communication Services, GATS, Practices, and Antara News Agency.*